

# JAKARTA FAIR DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 1968-1975

**Ika Trisni Dwi Lestari**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya  
E-Mail: taritari0799@yahoo.co.id

**Sri Mastuti P.**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya

## Abstrak

Kegiatan pameran sudah ada sejak masa Hindia Belanda. Kegiatan tersebut diadakan di kota besar, seperti *Jaarmarkt* di Surabaya, dan Pasar Malam Gambir di Batavia. Dalam kegiatan tersebut dipamerkan barang-barang industri, kerajinan tangan, serta aneka hiburan. Pada masa modern kegiatan pameran juga sering diadakan di banyak kota di Indonesia, salah satunya Jakarta Fair. Jakarta Fair adalah pameran tahunan berskala nasional, dalam perkembangannya Jakarta Fair menjadi pameran bertaraf internasional. Jakarta Fair memiliki fungsi sebagai media promosi sekaligus sebagai sarana hiburan, sehingga tentu dengan diselenggarakannya Jakarta Fair banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.

**Kata Kunci:** Djakarta Fair, pertumbuhan ekonomi

## Abstract

*Exhibition has existed since the Dutch colonial era. It was held in the big cities, such as Jaarmarkt in Surabaya, and Gambir night market in Batavia. In those event exhibited industrial goods, handicrafts, and many kinds of live entertainment. In modern era the exhibitions are often held in many cities in Indonesia, for example Jakarta Fair. Jakarta Fair is an annual national exhibition. Later its develop, Jakarta Fair become an international exhibition. It has function as a promotion media and entertainment facility. Surely, there are so many benefits that can be perceived by the public.*

**Keywords:** Jakarta Fair, economic growth

## A. Pendahuluan

Kegiatan pameran sudah ada sejak masa Hindia Belanda. Pada tahun 1921 di Batavia ada pasar malam Gambir, di Surabaya kegiatan pameran pada saat itu bernama *Jaarmarkt*. Meskipun masih dalam format yang sederhana, namun inti dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah sama dengan kegiatan pameran yang umum saat ini yaitu memamerkan produk-produk perdagangan maupun industri sekaligus sebagai hiburan rakyat. Dalam perkembangannya, kegiatan ini menjadi cikal-bakal dari penyelenggaraan pameran Jakarta Fair. Kegiatan pameran tersebut merupakan salah satu bentuk media promosi.

Kegiatan pameran sudah umum diselenggarakan di kota-kota besar di mancanegara, seperti *Hamburg Fair*, dan *Leipzig Fair*.<sup>1</sup> Di Indonesia kegiatan pameran tidak hanya ada di Jakarta. Di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Palembang, Medan, Makassar, dan kota-kota lainnya sering diadakan kegiatan

pameran.<sup>2</sup> Salah satu kegiatan pameran yang populer di Indonesia adalah Jakarta Fair. Seperti kegiatan pameran pada umumnya, di dalam Jakarta Fair dipamerkan banyak produk-produk perdagangan maupun industri. Hal ini sesuai dengan maksud pemerintah DKI Jakarta yang tidak hanya menggagas Jakarta Fair sebagai kegiatan untuk meramaikan HUT DKI Jakarta, tetapi juga untuk turut mensukseskan Pelita berkaitan dengan kegiatan mempromosikan bidang-bidang industri dan perdagangan.<sup>3</sup> Jakarta Fair dimaksudkan sebagai suatu pekan raya niaga yang murni (*trade fair*), disamping sebagai pameran yang lebih umum sifatnya (*general fair*) yaitu pekan raya yang menyajikan hiburan-hiburan murah untuk rakyat, sebagai solusi untuk memenuhi sarana hiburan rakyat yang murah dan sehat. Jakarta Fair rutin diadakan satu kali dalam setahun, bertepatan dengan HUT DKI Jakarta. Kegiatan ini pertama kali

<sup>2</sup> Novia Anggraini, *op. cit.*, hlm. 3

<sup>3</sup> Badan Pengurus Pekan Raya Jakarta, *Pekan Raya Jakarta VIII 1975 (14 Juni-19 Juli)*, (Jakarta: PT. Prima Advera LTD, 1975), hlm. 8.

<sup>1</sup> Ramadhan K.H., *Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm 195.

diselenggarakan pada tahun 1968, pada masa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin.

Kedudukan geografis Jakarta dalam lingkup nusantara menunjukkan kekokohan kedudukan ekonomis yang menguntungkan. Jakarta memiliki status dan kedudukan administratif sebagai ibukota negara, sehingga memiliki kelengkapan prasarana kota yang potensial untuk mendukung kekuatan ekonomi. Selain itu Jakarta merupakan pusat kegiatan politik nasional dan salah satu sentra politik Asia Pasifik, tempat beradanya kedutaan besar negara sahabat. Dengan demikian Jakarta telah menjadi pusat kegiatan ekonomi regional, nasional, dan internasional, hampir 80% kegiatan ekonomi global yang ada di Indonesia berada di Jakarta. Di masa Orde Baru Jakarta adalah pusat kegiatan investasi. Pemerintah pada saat itu menjalankan serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk menstabilkan perekonomian dan sistem politik guna meningkatkan *output* dan produktivitas di bidang pertanian, serta menarik investasi asing dan swasta dalam negeri.<sup>4</sup> Masuknya modal-modal tersebut mendorong pertumbuhan sektor pertambangan dan industri.<sup>5</sup> Di Jakarta sendiri perusahaan kecil, menengah dan besar telah meningkat jumlahnya, dari sekitar 36.000 pada tahun 1969 menjadi 65.000 pada tahun 1975.<sup>6</sup> Dari kondisi tersebut muncul kebutuhan baru yaitu sarana untuk mempromosikan produk-produk nasional baik produk industri maupun perdagangan. Karena itu, Pemda DKI gencar melakukan pembangunan untuk membenahi infrastruktur kota dan menambah fasilitas-fasilitas yang menunjang kemajuan ekonomi. Salah satu kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam bidang ekonomi adalah penyelenggaraan Jakarta Fair.

Arena Djakarta Fair dapat dikatakan sebagai 'etalase' produk-produk Indonesia yang didagangkan pada periode tersebut. Dengan demikian, Jakarta Fair memiliki fungsi sebagai sarana promosi produk-produk nasional kepada masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan hal tersebut diperoleh rumusan masalah: 1.) Mengapa diselenggarakan Jakarta Fair tahun 1968?; 2.) Bagaimana dampak penyelenggaraan Jakarta Fair terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1968-1975?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelaahan Jakarta Fair dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini adalah dengan menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis untuk memberikan bantuan dalam pengumpulan sumber, penilaian kritis dan menyajikannya yang biasanya dalam bentuk tertulis.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Jan L. Z. dan Daan Marks, *Ekonomi Indonesia 1800-2010; Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan* (Jakarta: Kompas, 2012), hlm. 342.

<sup>5</sup> Anne Both dan Peter McCawley, *op. cit.*, hlm. 5

<sup>6</sup> Paramita Widyaningrum, *Peranan Ali Sadikin Dalam Pembangunan Kota Jakarta Tahun 1966-1977*, (Solo: FKIP UNS) hlm. 13,

<sup>7</sup> Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya: Unesa University Press, 2005) hlm. 10-11.

Penelitian diawali dengan tahap heuristik yaitu mengumpulkan sumber, berupa surat kabar atau majalah yang memuat berita penyelenggaraan Jakarta Fair tahun 1968-1975, dan mengumpulkan buku-buku yang membahas tentang Jakarta Fair, buku-buku tentang sejarah Kota Jakarta, serta buku-buku yang membahas tentang perekonomian Indonesia era Orde Baru.

Sumber yang didapat oleh peneliti yaitu artikel mengenai penyelenggaraan Djakarta Fair dalam koran *Kompas* tahun 1968 sampai 1969, dan artikel dalam Majalah *Sketmasa*, *Tempo*, *Varia*, dan *Ekspress* tahun 1969-1975, artikel-artikel tersebut membahas tentang kegiatan penyelenggaraan Jakarta Fair, animo masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut, serta informasi-informasi lain tentang Jakarta Fair.

Peneliti juga mendapatkan sumber primer berupa arsip yaitu Peraturan Presiden nomor 6 tahun 1961 tanggal 20 april 1961, tentang penyelenggaraan pekan raya dan pameran Indonesia. Perpres ini mengatur tentang lembaga penyelenggara pekan raya dan pameran Indonesia. Selain itu peneliti juga mendapatkan *Laporan Keuangan Bank Indonesia 1967/1968-1974/1975*. Semua sumber didapatkan dari Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Medayu Agung Surabaya, dan Perpustakaan Bank Indonesia, Surabaya.

Langkah kedua adalah kritik sumber (analisis), pada tahap ini peneliti melakukan pengkategorian sumber. Sumber-sumber yang didapat dikategorikan berdasarkan dua hal yaitu Jakarta Fair dan pertumbuhan ekonomi. Untuk menjelaskan latarbelakang dan ide penyelenggaraan Jakarta Fair, serta aktivitas ekonomi di arena Jakarta Fair, rujukan yang digunakan peneliti diantaranya buku biografi Gubernur Ali Sadikin berjudul *Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977* karya K. H. Ramadhan, yang diterbitkan tahun 1975. Di dalam buku ini terdapat satu bab tentang Jakarta Fair. Bab tersebut menjelaskan tentang ide penyelenggaraan Jakarta Fair, awal penyelenggaraan kegiatan tersebut, dan segala hal yang berkaitan dengan Jakarta Fair. Kemudian buku yang membahas tentang Jakarta Fair berjudul *Pekan Raya Jakarta VIII 1975 (14 Juni-19 Juli)*, yang ditulis oleh Badan Pengurus Pekan Raya Jakarta, dan diterbitkan tahun 1975.

Data pertumbuhan ekonomi Indonesia di awal Orde Baru diperoleh dari *Laporan Keuangan Bank Indonesia 1967/1968-1974/1975*. Selain itu peneliti juga menggunakan buku berjudul *Ekonomi Orde Baru* karya Anne Booth dan Peter Mc.Cawley yang diterbitkan tahun 1982. Buku ini membahas tentang kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru dan hasil-hasil yang telah dicapai. Buku lain adalah *Perekonomian Indonesia* ditulis oleh P.C. Suroso, diterbitkan tahun 1994. Buku ini membahas tentang perkembangan ekonomi Indonesia sejak Orde Lama hingga Orde Baru. Penulis juga menggunakan paper karangan Mitsuhiro Hayashi berjudul *Development of SME's in The Indonesian Economy*, diterbitkan oleh Australia National University. Paper tersebut berisi tentang pembangunan industri manufaktur di Indonesia, di dalamnya ada informasi penting yaitu mengenai ekspor dan impor barang-barang industri di Indonesia.

Langkah selanjutnya melakukan interpretasi. Langkah ini dilakukan untuk menemukan dan memahami fakta serta hubungan antar fakta yang ada. Langkah terakhir yaitu menuliskan hasil eksplanasi tersebut dalam bentuk rekonstruksi sejarah atau historiografi.

## B. Hasil Dan Pembahasan

### Latar Belakang Diselenggarakannya Jakarta Fair

Di awal tahun 1968 kondisi Jakarta bisa dikatakan mengalami ketidakseimbangan perkembangan fisik sarana kota dengan kebutuhan penduduknya. Misalnya dalam hal infrastruktur jalan raya, pada saat itu jumlah panjang jalan masih berkisar pada 800 km. Perbandingan antara jumlah mobil dengan panjang jalan rata-rata 200 kendaraan per kilometer. Tahun 1962 tercatat sepertiga jumlah mobil yang ada di Indonesia terdapat di Jakarta. Jumlahnya lebih dari 43.000 unit.<sup>8</sup> Akibatnya kemacetan sering terjadi pada jaringan jalan-jalan yang jumlahnya sedikit. Jalan yang ada tersebut hanya menghubungkan sebagian wilayah kota yang telah terbangun dengan kualitas teknis yang perlu ditingkatkan.<sup>9</sup> Dalam hal transportasi umum, tahun 1966 bus kota hanya beroperasi pada trayek-trayek tertentu saja, dan kurang mencukupi kapasitas angkutan yang diperlukan. Selain itu angkutan umum lain yang ada pada saat itu adalah angkutan umum yang masih sederhana dan kurang efisien seperti oplet, dan becak.<sup>10</sup>

Selain masalah transportasi, masalah pemukiman penduduk menjadi salah satu hal yang harus mendapat perhatian besar dari Pemda Jakarta. Jumlah pemukiman layak yang ada tidak sebanding dengan jumlah penduduk Jakarta yang sangat banyak. Tahun 1961 Jakarta berpenduduk 2.079.000 jiwa. Antara tahun 1966 dan 1976 penduduk Jakarta bertambah dari 3,6 juta orang menjadi lebih dari 5,7 juta orang. Selama periode yang sama luas wilayah kota hanya bertambah sedikit. Antara tahun 1961 hingga tahun 1971 pertambahan tahunannya hanya 4,5 %. Sehingga Jakarta bisa disebut kota dengan pertambahan penduduk yang tinggi di Indonesia.<sup>11</sup> Implikasi dari pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah masalah pemukiman. Pada saat itu sekitar 60% penduduk Jakarta atau kurang lebih 3 juta orang tinggal di kampung-kampung yang miskin. Keadannya menyedihkan. Sanitasinya buruk, tidak ada fasilitas-fasilitas pokok untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang sehat.<sup>12</sup>

Listrik dan telekomunikasi pada saat itu kapasitasnya belum cukup untuk kebutuhan publik yang besar. Listrik yang ada baru dapat memenuhi 13% dari kebutuhan kota. Jumlah pesawat telepon yang ada

baru dapat memenuhi pelayanan dengan 26.000 pesawat. Sedangkan televisi masih terbatas jumlahnya, karena baru masuk tahun 1962.

Kondisi fisik Jakarta pada saat itu bisa dikatakan masih kurang baik, dari segi pelayanan publik maupun dalam hal tuntutan sebagai ibukota negara. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Gubernur Ali Sadikin dalam buku biografinya:

*Keadaan fisik kota yang saya hadapi saat itu sungguh-sungguh memerlukan penanganan secara seksama, untuk dapat menyelamatkan kehidupan perkotaan secara wajar.<sup>13</sup>*

Jadi tugas Pemda Jakarta saat itu adalah bagaimana membenahi keadaan fisik kota yang kurang layak, serta mengembangkannya, karena Jakarta adalah ibukota negara sehingga Jakarta harus memiliki standar kelayakan yang tinggi. Untuk dapat memecahkan masalah tersebut tentu Pemda Jakarta membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Secara keseluruhan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sepertiganya berasal dari pemasukan daerah dan dua pertiga dari Pemerintah Pusat. Pada saat itu jumlah APBD Jakarta hanya 66 juta per tahun, APBD Jakarta terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 1966/1967 hingga tahun 1977/1978 APBD DKI Jakarta meningkat dari Rp. 1.169.273.293,00 menjadi Rp. 89.516.580.000,00 atau sekitar 77 kali lipat meningkat dalam waktu 11 tahun.<sup>14</sup> Akan tetapi peningkatan tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan dana yang harus dikeluarkan utamanya untuk pembiayaan pembangunan.

Untuk keperluan pembangunan, tentu ada alokasi dana khusus. Anggaran untuk pembangunan yang direncanakan oleh Pemda Jakarta adalah sebesar 50% dari APBD. Dalam Pelita I DKI Jakarta tahun 1969/1970-1973/1974 proyek-proyek Pembangunan dikelompokkan menurut pembedaan, yaitu Bidang Pemerintah, Bidang Keamanan, dan Ketertiban, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Prasarana, Bidang Perekonomian, dan Bidang Perbaikan Perkampungan. Selain itu untuk tahun anggaran 1971/1972 pembedaan kegiatan bertambah satu yaitu PON VIII (Pekan Olahraga Nasional), yang diadakan di Jakarta. Dari semua bidang pembangunan yang direncanakan, bidang prasarana mendapatkan alokasi dana paling tinggi yaitu sebesar 40% dari total anggaran untuk pembangunan.<sup>15</sup> Besarnya anggaran yang direncanakan Pemda Jakarta tersebut adalah karena kebutuhan untuk pembangunan merupakan kebutuhan yang *urgent* (mendesak) dan paling mendapat perhatian. Namun iklim sosial-politik dan ekonomi pada saat itu menyebabkan sumber yang ada untuk membiayai pembangunan masih belum maksimal. Gubernur Ali Sadikin mengatakan:

<sup>8</sup> Susan Blackburn, *Jakarta Sejarah 400 Tahun*, (Jakarta: Masup Jakarta, 2011), hlm. 241

<sup>9</sup> Ramadhan K.H., *Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 117

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Susan Blackburn, *Op, Cit.*, hlm. 300

<sup>12</sup> Ramadhan K.H., *Op, Cit.*, hlm. 60

<sup>13</sup> Ramadhan KH, *Op, Cit.*, hlm. 117

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 114.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 116.



*Keadaan sosial-politik pun pada permulaan saya menjadi gubernur tidak mendorong dapat dikembangkannya Jakarta secara berencana. Jadi, saya benar-benar harus mencari akal, bagaimana mendapatkan biaya untuk itu dan juga bagaimana mendorong masyarakat untuk bergerak ke arah itu.*<sup>16</sup>

Pernyataan tersebut menguatkan fakta bahwa untuk membangun Jakarta dibutuhkan dana yang besar dan tidak hanya mengandalkan satu sumber dana, melainkan sumber-sumber dana yang lain harus digali dan diciptakan.

Usaha-usaha yang dilakukan Pemda Jakarta yaitu melakukan perbaikan dan penyempurnaan administrasi keuangan, mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan melakukan pencegahan terhadap cara-cara menghindarkan diri atau meringankan diri dari pembayaran pajak. Untuk memaksimalkan penerimaan, Pemda Jakarta pada saat itu melakukan langkah-langkah yang agresif. Beberapa pajak tertentu dilaksanakan secara intensif yaitu Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Pemeliharaan Pembangunan Prasarana Daerah (SWP3D), Pajak Rumah Tangga, Pajak Tontonan, Pajak Bangsa Asing, Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, dan Pajak Pembangunan I.<sup>17</sup>

Usaha-usaha untuk rehabilitasi dan pembangunan tersebut telah menciptakan iklim yang mendorong meluasnya objek pajak. Meningkatnya jumlah kendaraan-kendaraan bermotor baru menambah penerimaan SWP3D dan BBN. Berkembangnya usaha perhotelan dan restoran yang bertaraf internasional juga menambah penerimaan pajak pembangunan. Jumlah bioskop yang semakin meningkat dari 33 bioskop di tahun 1966 menjadi 125 pada tahun 1976 beserta tempat-tempat hiburan lainnya juga menambah penerimaan pajak tontonan.

Selain menjaring penerimaan pajak dari lapangan-lapangan usaha dan wajib pajak yang sudah ada, Pemda Jakarta juga menciptakan peluang lain untuk memperoleh pendapatan. Beberapa diantaranya yaitu kebijakan mendirikan lokalisasi judi, dan lokalisasi prostitusi Keramat Tunggak. Dua proyek ini dapat menambah penerimaan pajak daerah. Dalam APBD hasil dari proyek tersebut tergolong dalam penerimaan khusus. Kebijakan yang lainnya adalah mengadakan acara Jakarta Fair tahun 1968. Jakarta Fair merupakan kegiatan pameran besar untuk perdagangan dan industri sekaligus sebagai pesta rakyat. Di dalam Jakarta Fair juga terdapat berbagai macam hiburan. Melalui kegiatan ini Pemda DKI Jakarta tentu mendapat pemasukan. Keuntungan dari penyelenggaraan Jakarta Fair adalah menambah pemasukan yang tergolong dalam Pajak Pembangunan I.

Selain kebutuhan dana untuk pembangunan Pemda Jakarta pada saat itu juga berupaya meningkatkan

perekonomian. Untuk dapat mengembangkan perekonomian Pemda Jakarta harus dapat memenuhi fasilitas-fasilitas yang mumpuni untuk mendukung kegiatan perekonomian. Misalnya dengan memperbaiki infrastruktur yang kurang layak, seperti perbaikan jalan raya, perumahan-perumahan dan sebagainya. Lebih dari itu Pemda Jakarta juga menaruh perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti kebutuhan sarana untuk promosi karena sebagian besar kegiatan perekonomian di Jakarta adalah perdagangan dan industri. Gubernur Ali Sadikin mengatakan:

*Saya sudah memperhitungkan bahwa kalau kita menghidupkan produksi kita, kita memerlukan jalur dan lapangan pemasarannya. Dan dalam hal ini ada dua permasalahan, yakni produksi pihak yang kuat dan pihak yang lemah. Dua-duanya meminta perhatian saya dalam membuka jalan bagi pemasarannya.*<sup>18</sup>

Dari permasalahan tersebut muncul gagasan untuk mengadakan kegiatan pameran sebagai wadah untuk kegiatan promosi. Gagasan ini pernah disampaikan kepada pemerintah pusat oleh Gubernur Ali Sadikin namun kurang mendapat respon. Hasilnya ide tersebut kemudian dilanjutkan untuk kemudian diadakan suatu pameran yang bernama Jakarta Fair.

Jakarta Fair juga diadakan sebagai upaya untuk memenuhi sarana hiburan. Pada dasarnya tidak semua masyarakat Jakarta bisa memperoleh hiburan murah. Masyarakat golongan kaya mudah memperoleh hiburan karena mereka memiliki daya beli tinggi. Masyarakat kaya di Jakarta pada saat itu mampu menjadi konsumen barang-barang dan fasilitas mewah, berkendara Volvo, atau Mercedes Benz, bermain golf, mengunjungi *night club* dimana pada saat itu ada sekitar 30 *night club* bermunculan, bahkan beberapa diantaranya memiliki *casino*.<sup>19</sup> Sedangkan masyarakat yang tergolong menengah maupun miskin mengalami kesulitan memperoleh hiburan yang murah. Mereka adalah masyarakat dengan penghasilan terbatas. Pada saat itu banyak golongan menengah dan miskin di Jakarta memanfaatkan keuntungan dari ledakan konstruksi dan pekerjaan pabrik untuk menghasilkan biaya hidup. Mereka juga memanfaatkan keramaian kota untuk berdagang.

Tahun 1968 Pemda Jakarta mengadakan sebuah pekan raya dengan konsep pesta rakyat yang bernama Jakarta Fair. Pekan raya tersebut diadakan dengan tujuan untuk memenuhi sarana hiburan yang murah untuk rakyat, seperti yang dikatakan Gubernur Ali Sadikin:

*Di samping sebagai wadah pameran dan promosi, pekan raya ini saya maksudkan pula sebagai usaha Pemda DKI Jakarta untuk menambah dan mencukupi tempat-tempat hiburan dan*

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 113

<sup>18</sup> Ramadhan KH, *Op. Cit.*, hlm. 195.

<sup>19</sup> Susan Blackburn, *Op. Cit.*, hlm. 319.

*rekreasi yang sehat dan murah bagi warga kota.*<sup>20</sup>

Dengan demikian Jakarta Fair menjadi salah satu sarana hiburan yang dapat dinikmati semua kalangan. Ide penyelenggaraan Jakarta Fair sudah dirintis sejak lama. Tahun 1961 pemerintah pernah mengeluarkan peraturan mengenai penyelenggaraan pekan raya melalui Peraturan Presiden No. 18 tahun 1961. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pekan raya yang dikelola oleh LEPPRI (Lembaga Pameran dan Pekan Raya Indonesia). Pada saat itu juga disiapkan suatu badan pengelola persiapan penyelenggaraan Pekan Raya Internasional yaitu BAPPRI (Badan Persiapan Pekan Raya Internasional). Namun karena beberapa hal, persiapan-persiapan yang sudah dilakukan kemudian terhenti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.04/ 64. LEPPRI kemudian dibubarkan sehingga rencana untuk mengadakan suatu Pekan Raya di Jakarta tidak terlaksana. Pada tanggal 24 Juli 1967 Gubernur Ali Sadikin memanggil semua unsur pimpinan perusahaan swasta nasional, koperasi serta perusahaan negara untuk membentuk panitia persiapan Kadin (Kamar Dagang dan Industri). Pada akhir Oktober 1967 Kadin Jaya terbentuk, dan diketuai oleh Sjamsudin Mangan. Dari saat itulah ide penyelenggaraan Jakarta Fair dilimpahkan kepada Kadin.<sup>21</sup>

Penyelenggaraan Jakarta Fair diinspirasi oleh pameran-pameran yang pernah populer pada masa Hindia Belanda, salah satunya adalah Pasar Gambir. Pasar Gambir adalah pameran tahunan yang diselenggarakan di Batavia (Jakarta saat ini) untuk memperingati tahun penobatan Ratu Wilhelmina. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Lapangan Gambir (sekarang Monas). Konten acara pada Pasar Gambir umumnya tidak jauh berbeda dengan Jakarta Fair, yaitu pameran kesenian dan produk-produk dari berbagai daerah, serta berbagai macam hiburan rakyat (komedi putar, atraksi, komedi bangsawan, *American Carnival Show*)<sup>22</sup>

Tujuan diselenggarakannya Jakarta Fair adalah:

- 1.) mendorong dan memberikan kesempatan perkembangan, perluasan dan promosi usaha-usaha di bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal asing, kerajinan rakyat dan jasa-jasa serta kegiatan perekonomian pada umumnya;
- 2.) mendorong dan mengembangkan kreasi dan kegiatan seni/ budaya yang tidak bertentangan dengan kepribadian Pancasila;
- 3.) mendorong dan mengembangkan usaha industri kepariwisataan;
- 4.) memberikan rekreasi dan hiburan yang sehat kepada masyarakat;
- 5.) mendorong dan mengembangkan kegiatan/ usaha yang berbentuk

edukatif/ informatif ke arah peningkatan kehidupan masyarakat spirituiil maupun materiil.<sup>23</sup>

Kegiatan ini memiliki beberapa sasaran, yaitu sasaran niaga dan ekonomi, sasaran sosio-kultural, dan sasaran hubungan ekonomi dan kultural antar bangsa. Khusus untuk sasaran sosio-kultural, Jakarta Fair memiliki peranan sebagai sebuah festival tahunan dan pekan raya umum terutama bagi masyarakat ibukota dan sekitarnya, sebagai *event* khusus untuk memperingati hari jadi DKI Jakarta, sebagai arena hiburan dan rekreasi bagi masyarakat, serta sebagai bagian dari promosi pariwisata Jakarta.<sup>24</sup> Tujuan dan sasaran tersebut menunjukkan bahwa sejak semula Jakarta Fair dimaksudkan sebagai suatu pekan raya niaga yang murni (*trade fair*), disamping sebagai pekan raya yang lebih umum sifatnya (*general fair*), dengan tujuan pokok sebagai usaha meningkatkan promosi produk-produk dalam negeri. Selain itu Jakarta Fair juga dimaksudkan sebagai usaha Pemda Jakarta untuk menambah dan mencukupi tempat-tempat hiburan dan rekreasi yang sehat dan murah bagi warga Jakarta dan sekitarnya.

## Pengelolaan Jakarta Fair

### 1. Kepanitiaan

Jakarta Fair yang pertama diselenggarakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang baru dibentuk pada tahun 1967. KADIN pada saat itu diketuai oleh Sjamsudin Mangan, namun dalam perkembangannya susunan panitia penyelenggara Jakarta Fair berubah, karena Sjamsudin Mangan telah meninggal sebelum Jakarta Fair diberlangsungkan. Panitia pelaksanaan Jakarta Fair kemudian diketuai oleh Usman Ismail.

Dalam kepanitiaan, pembinaan dan bimbingan terhadap kegiatan Djakarta Fair dilakukan oleh suatu Dewan Penasehat/ Pengawas yang diketuai oleh Gubernur Kepala DKI Jakarta. Di bidang assistensi, Badan Pengurus kegiatan ini dibantu oleh unsur-unsur teknis yang terdiri dari instansi-instansi pemerintah yang diperlukan, dan dikoordinir oleh Kepala Direktorat V/ Perekonomian DKI.<sup>25</sup> Untuk menyelenggarakan acara yang cukup besar seperti Jakarta Fair perlu dibentuk lembaga khusus yang menangani penyelenggaraan acara tersebut. Jakarta Fair yang semula dikelola oleh suatu panitia kecil yang dibentuk oleh KADIN (Kamar Dagang dan Industri), sejak tahun 1969 diganti oleh Yayasan Penyelenggara Pekan Raya Jakarta sebagai badan penyelenggara yang dibentuk pada akhir tahun 1968 oleh Pemda DKI Jakarta.

### 2. Konsep Acara

Jakarta Fair diselenggarakan setiap tahun, dengan waktu pelaksanaan yang sengaja dilaksanakan berdekatan dengan HUT DKI Jakarta. Hal ini sudah

<sup>20</sup> Ramadhan KH, *Op, Cit.*, hlm. 196.

<sup>21</sup> *ibid*, hlm. 196.

<sup>22</sup> *Ensiklopedi Jakarta Vol , I*, hlm. 66.

<sup>23</sup> Badan Pengurus Pekan Raya Jakarta, *Pekan Raya Jakarta VIII 1975 ( 14 Juni-19 Juli)*, (Jakarta: Prima Advera, 1975), hlm. 8.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm, 43

menjadi agenda tetap, kecuali pada penyelenggaraan Jakarta Fair tahun 1971 yang dilaksanakan tidak berdekatan dengan HUT DKI Jakarta karena terhalang oleh suasana Pemilu pada saat itu.<sup>26</sup>

Konsep acara Jakarta Fair adalah sebagai ajang pameran dan pekan raya. Sebagai ajang pameran, di dalam Jakarta Fair dipamerkan produk-produk industri dan perdagangan. Sebagai ajang pekan raya, Jakarta Fair dibuat seperti sebuah pesta rakyat tahunan. Karena itu, arena Jakarta Fair tidak hanya diisi oleh kegiatan promosi tetapi juga kegiatan hiburan. Berikut adalah tabel perkembangan jenis-jenis kegiatan yang ada di Jakarta Fair dari tahun ke tahun:

**Tabel. 1**  
**Perkembangan Kegiatan-Kegiatan di Jakarta Fair Tahun 1968-1974**

Kegiatan	68	69	70	71	72	73	74
Pameran	43	47	88	84	72	75	72
Pameran dan Penjualan	62	83	62	70	82	92	117
Rumah Makan	41	81	76	49	46	42	40
Hiburan, Ketangkasan	15	23	28	20	18	11	11

Sumber: Badan Pengurus Pekan Raya Jakarta, *Pekan Raya Jakarta VIII 1975 (14 Juni-19 Juli)*, (Jakarta: Prima Advera LTD, 1975), halaman 34

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kegiatan promosi dan penjualan lebih banyak daripada kegiatan hiburan. Hal ini menandakan bahwa Jakarta Fair menjalankan fungsi utamanya sebagai ajang promosi, namun tetap memiliki konten hiburan. Perkembangan masing-masing kegiatan dari tahun ke tahun memang tidak selalu stabil. Tahun 1974 ketika terjadi peristiwa Malari pada bulan Januari, tidak berdampak buruk terhadap aktivitas perdagangan di Jakarta Fair. Kegiatan pameran cenderung stabil, bahkan kegiatan penjualan semakin meningkat. Hal ini sangat mungkin disebabkan oleh iklim perekonomian yang sudah semakin stabil sejak awal Orde Baru. Diantara semua kegiatan, yang paling menunjukkan ada peningkatan yang cukup bagus adalah kegiatan pameran dan penjualan. Semakin banyaknya kegiatan pameran dan penjualan menunjukkan bahwa Jakarta Fair mendapat respon positif dari kalangan niaga dan pelaku usaha sebagai kegiatan yang mampu menjadi sarana promosi yang baik.

### 3. Stand-Stand yang Mengisi Jakarta Fair

Stand-stand yang mengisi arena Jakarta Fair antara lain: stand-stand Departemen dan Lembaga; stand Pemerintah Daerah; stand negara-negara sahabat (stand pemerintah asing perusahaan swasta asing, dan stand usaha campuran); stand perusahaan (swasta nasional, perusahaan negara, perusahaan daerah); bank dan koperasi.

Stand-stand instansi milik pemerintah memamerkan perkembangan dan kemajuan-kemajuan yang dicapai tiap-tiap instansi. Stand-stand tersebut antara lain: stand Departemen Perindustrian; Departemen Pertambangan; Departemen Pertanian; Departemen Penerangan; Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN); Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN); dan Perbankan. Instansi-instansi tersebut memanfaatkan Jakarta Fair sebagai media sosialisasi kepada masyarakat mengenai program-program yang dimiliki tiap-tiap instansi. Misalnya Stand BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang melakukan kegiatan penerangan dan motivasi keluarga berencana kepada para pengunjung. Barang-barang yang dipamerkan berupa foto-foto, serta alat-alat peraga. BKKBN juga membuka layanan konsultasi untuk pengunjung.<sup>27</sup>

Untuk stand perbankan, peserta yang mengikuti Jakarta Fair tidak hanya bank-bank nasional tetapi juga diikuti bank-bank swasta. Misalnya pada penyelenggaraan Jakarta Fair tahun 1975, diikuti oleh empat bank negara yaitu Bank Indonesia (BI); Bank Negara Indonesia (BNI); Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Pembangunan Daerah Jakarta. Selain bank negara, bank swasta juga turut serta menjadi peserta, ada dua bank swasta yang mengikuti Jakarta Fair 1975 yaitu Bank Bumi Daya dan Bappindo. Stand perbankan ini memamerkan berbagai informasi mengenai bank terkait beserta produk-produk nasabah.

Arena Jakarta Fair juga diramaikan oleh stand-stand perusahaan dan pedagang baik dari perusahaan-perusahaan dan pedagang baik kecil maupun besar. Jakarta Fair juga diramaikan produk-produk kerajinan tangan, misalnya perkakas dari kayu, sapu lidi, kerajinan dari bulu ayam, dan kerajinan-kerajinan tangan dari berbagai daerah.<sup>28</sup> Selain itu juga terdapat barang-barang kelontong yang dipamerkan dan dijual di arena ini. Salah satu peserta yang memamerkan barang-barang kelontong adalah Sarinah Department Store. Berikut adalah contoh perusahaan lokal yang pernah berpartisipasi di Jakarta Fair.

**Tabel 2**  
**Beberapa Perusahaan Lokal yang Pernah Berpartisipasi di Jakarta Fair**

Industri	Produk yang Dipromosikan
PN. Industri Sandang	Tekstil
PN. Balai Pustaka	Buku
PT. Gunung Agung	Buku dan alat tulis
PT. Bata	Sepatu dan alas kaki
Yayasan Varia Minang	Kerajinan rakyat dari Sumatera Barat.

Sumber: Data diolah sendiri oleh peneliti dari berbagai sumber

<sup>27</sup> Badan Pengurus Pekan Raya Jakarta, *Op. Cit.*, hlm. 8. hlm. 78

<sup>28</sup> Majalah Sketmasa, 3 Juli 1969, *Ekonomisasi Melalui Djakarta Fair*, hlm.17

<sup>26</sup> Majalah Ekspres, 2 agustus 1971, '4x4x4 Djakarta Fair 71 Dibuka', hlm. 25.



Produk-produk yang mengisi Jakarta Fair tidak hanya produk dalam negeri, tetapi juga ada produk-produk dari luar negeri, karena para peserta tidak hanya organisasi-organisasi ekonomi swasta dalam negeri maupun nasional tetapi juga organisasi-organisasi ekonomi yang datang dari luar negeri. Kebanyakan organisasi ekonomi yang berasal dari luar negeri adalah mereka yang mempunyai kegiatan di bidang impor. Para peserta asing ini diberi fasilitas paviliun-paviliun yang menampung kepentingan serta kegiatan para pengusaha masing-masing negara.<sup>29</sup> Stand-stand luar negeri memamerkan produk-produk dari masing-masing negara. Misalnya pada Jakarta Fair 1975 stand Jepang dan Taiwan memamerkan mesin-mesin produksi perusahaan-perusahaan kedua negara tersebut.

### Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1968-1975

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses pertambahan bahan riil pada kapasitas suatu negara dalam produksi barang-barang dan jasa-jasa, sekaligus dengan ekspansi hasil produksi. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang.<sup>30</sup> Pada masa awal Orde Baru perekonomian Indonesia tumbuh lebih dari 7% per tahun, keadaan ini berlangsung sejak tahun 1968 hingga 1981.<sup>31</sup> Selama lima Repelita yang pertama dibawah Soeharto, pertumbuhan PDB meningkat rata-rata 6,8 % per tahun.<sup>32</sup> Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut salah satunya ditopang oleh naiknya harga minyak dunia tahun 70-an, terutama sejak tahun 1974 ketika harga minyak dunia melonjak dengan cepat. Selain karena sektor minyak, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut juga ditunjang oleh banyak unsur.

Dalam suatu penerbitan Lembaga Administrasi Negara, pengertian pertumbuhan dijabarkan dengan 14 'meningkat' sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi domestik bruto (PDB) setiap tahun dalam prosentase tertentu di atas tingkat pertumbuhan penduduk.
2. Meningkatnya pendapatan nasional setiap tahun dalam prosentase tertentu di atas tingkat pertumbuhan penduduk.
3. Meningkatnya pendapatan per kapita
4. Meningkatnya volume ekspor setiap tahun.
5. Meningkatnya produksi pangan setiap tahun di atas pertumbuhan penduduk.
6. Meningkatnya anggaran pembangunan pemerintah setiap tahun.

<sup>29</sup> Koran Kompas, 11 Juli 1969, "Organisasi-Organisasi Swasta Belum Memanfaatkan DF", hlm.2

<sup>30</sup> P.C. Suroso, *Perekonomian Indonesia; Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 1994, hlm. 27.

<sup>31</sup> Donald, K. Emmerson, *Indonesia Beyond Soeharto; Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 191

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 192

7. Meningkatnya nilai investasi nasional setiap tahun.
8. Meningkatnya nilai tabungan setiap tahun.
9. Meningkatnya investasi nasional yang lebih produktif dan menyangkut kepentingan rakyat banyak.
10. Meningkatnya pendapatan dan cadangan devisa setiap tahun, lebih besar dibandingkan dengan ekspor barang dan jasa.
11. Meningkatnya nilai ekspor dan impor per kapita per tahun.
12. Meningkatnya prasarana produksi, perhubungan, sosial, dan pemerintahan.
13. Meningkatnya kemampuan pelayanan kesehatan, sosial, rekreasi dan sebagainya.
14. Meningkatnya pertumbuhan konsumsi masyarakat dan pemerintah.<sup>33</sup>

Dari keempatbelas indikator pertumbuhan ekonomi tersebut, Djakarta Fair memiliki peranan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu membantu pemerintah meningkatkan nilai ekspor dan impor, serta investasi nasional. Seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri Adam Malik:

*Penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta jelas akan memberikan sumbangan yang sangat berarti sebagai sarana promosi dipelbagai bidang seperti perdagangan, perindustrian, penanaman modal asing dan modal dalam negeri, kepariwisataan dan kebudayaan.*<sup>34</sup>

Peranan Djakarta Fair untuk meningkatkan ekspor, impor dan investasi karena Djakarta Fair memicu perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

### 1. Dampak terhadap Ekspor Indonesia

Jakarta Fair adalah salah satu pameran yang dampaknya dapat mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia. Komoditi yang didagangkan dan dipamerkan di Jakarta Fair sangat beragam dan diikuti oleh berbagai macam industri maupun pedagang.<sup>35</sup> Beberapa barang yang dipamerkan ada yang dapat menembus ekspor. Misalnya pada penyelenggaraan Jakarta Fair tahun 1975, salah satu komoditi yang dipromosikan untuk ekspor adalah kayu.

Promosi komoditi-komoditi ekspor di Jakarta Fair dilakukan oleh BPEN (Badan Pengembangan Ekspor Nasional) yang menjadi salah satu peserta Jakarta Fair. Aktivitas yang dilakukan BPEN di arena Jakarta Fair tersebut adalah menyelenggarakan suatu display khusus dalam rangka usaha pengembangan industri perkayuan untuk ekspor. Di dalam display tersebut dipamerkan

<sup>33</sup> Tom Gunadi, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 45*, (Bandung: Angkasa, 1981), hlm. 314.

<sup>34</sup> Badan Pengurus Pekan Raya Jakarta, *Op. Cit.*, hlm. 8

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 245.

barang-barang atau produk dari industri perkayuan yang telah dapat dibuat di Indonesia, dan barang-barang kayu yang sedang mendapat pasaran di luar negeri. Selain memamerkan barang-barang hasil industri kayu, BPEN juga memamerkan cara-cara membuat dan memproduksi barang-barang tersebut serta mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi barang-barang tersebut beserta cara mengoperasikannya.tersebut dilakukan oleh BPEN.

Dari pameran barang-barang hasil industri kayu tersebut, para usahawan akan mendapat banyak informasi tentang barang-barang hasil industri kayu. Calon-calon pembeli dari luar negeri pun akan dapat menyaksikan potensi hasil-hasil industri kayu Indonesia. Pembeli yang berasal dari luar negeri umumnya datang dari negara –negara maju dan memiliki kebutuhan hasil-hasil kayu yang makin meningkat. Tujuan ekspor produk kayu di tahun 70-an terutama ke Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura.<sup>36</sup> Hasil dari usaha mendorong peningkatan ekspor produk industri kayu tersebut dapat dilihat dari perkembangan ekspor kayu dari total ekspor non migas dan nilai ekspor setiap tahunnya.<sup>37</sup>

**Tabel 3**  
**Nilai Ekspor Industri Perkayuan Tahun 1969-1977 (dalam juta US \$)**

Tahun	Kayu Lapis	Kayu Gergajian	Kayu Olahan Lain
1969/1970	-	1,8	0,1
1970/1971	-	2,4	0,2
1971/1972	-	2,3	0,5
1972/1973	-	7,2	1,1
1973/1974	0,1	19,8	2,3
1974/1975	-	24,3	2,0
1975/1976	0,2	37,1	1,7
1976/1977	0,9	64,9	2,8

Sumber: Zulkarnain Jamin, *Perekonomian Indonesia Edisi Dua*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), 1993, hlm. 204

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai ekspor hasil industri perkayuan secara umum meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 1969-1972 belum ada ekspor untuk Industri kayu lapis, namun di tahun 1973 sudah ada data bahwa pada tahun tersebut industri kayu lapis telah melakukan ekspor. Nilai ekspor meningkat secara signifikan pada periode 1976/1977. Kayu gergajian pun mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan pendapatan paling besar pada periode 1976/1977 yaitu sebesar 64,9 juta US dollar. Sedangkan untuk industri kayu olahan selain kayu lapis dan gergajian, perkembangannya rata-rata meningkat. Nilai ekspor kayu olahan lain paling tinggi pada periode tahun 1976/1977 yaitu sebesar 2,8 juta US dollar.

**Tabel 4**  
**Ekspor Industri Non Migas Indonesia Tahun 1971-1980 (%)**

Sektor	1971-1975	1975-1980
Makanan	55,9	37,2
Tekstil	1,4	4,3
<b>Kayu dan Kertas</b>	<b>4,9</b>	<b>13,7</b>
Industri kimia	28,6	30,3
Mesin		
– Industri logam	8,7	13,5
– Industri permesinan umum	4,8	2,2
– Mesin listrik	1,6	0,6
– Alat-alat transportasi	0,4	4,4
– Alat-alat berat	0,8	1,8
	0,3	0,7
Lain-Lain	0,5	1,0
Total	100,0	100,0

Sumber: Mitsuhiro Hayashi, *Development of SME's Indonesian Economy*, (Australia: Australia National University), hlm. 10.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai ekspor industri kayu dan termasuk kertas, meningkat dari 4,9 % pada tahun 1971-1975 menjadi 13,7 % pada tahun 1976-1980 dari total ekspor industri non migas.

Peningkatan ekspor industri kayu baik dari segi nilai ekspor maupun dari presentase total ekspor industri non migas Indonesia menunjukkan bahwa usaha pemerintah untuk meningkatkan ekspor di sektor tersebut cukup berhasil. Diantara usaha –usaha yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah promosi produk-produk kayu Indonesia untuk konsumen luar negeri melalui kegiatan pameran di Jakarta Fair.

## 2. Dampak terhadap Impor

Aktivitas ekonomi dalam Jakarta Fair selain memicu kegiatan ekspor juga berpengaruh terhadap impor Indonesia. Hal ini disebabkan terjadinya hubungan dagang antara pengusaha dan pedagang lokal dengan pelaku usaha dari luar negeri. Umumnya peserta asing menawarkan produk-produk berteknologi tinggi. Salah satu yang ditawarkan dari peserta luar negeri adalah mesin. Beberapa negara peserta Jakarta Fair yang menawarkan mesin adalah Jepang, China, Rusia, Jerman, Swedia dan Korea. Beberapa contoh barang-barang dari mesin tersebut antara lain:

**Tabel 5**  
**Mesin-Mesin Produksi Luar Negeri yang Dipamerkan di Jakarta Fair**

Jenis Mesin	Barang yang Dipamerkan
Mesin Listrik ( <i>Electrical Machinery</i> )	Diesel generator, Mesin las
Mesin Presisi	Pompa kompresor
Alat Transportasi	Mobil, truk gas, motor

Sumber: Identifikasi oleh peneliti dari kumpulan Koran dan Majalah tentang Djakarta Fair Tahun 1968-1975

Impor Indonesia untuk produk-produk mesin dapat dilihat dari tabel berikut:

<sup>36</sup> Bank Indonesia : Laporan Keuangan Tahun Pembukuan 1973/1974. Hlm 64

<sup>37</sup> Lihat Tabel 3 dan Tabel 4



**Tabel 6**  
**Perkembangan Impor Industri Non Migas Indonesia**  
**Tahun 1971-1980 (%)**

Sektor	1971-1975	1976-1980
Industri makanan	82	15,2
Industri Tekstil	6,9	3,5
Industri Kayu dan Kertas	3,0	3,3
Industri Kimia	30,2	28,8
Industri Permesinan		
- Industri Logam	6,4	6,7
- Industri permesinan umum	17,1	14,3
- Industri mesin listrik	7,8	10,2
- Alat-alat transportasi	15,3	13,8
- Industri mesin presisi	1,8	1,9
Lain-Lain	3,3	2,3
Total	100,0	100

Sumber: Mitsuhiro Hayashi, *Development of SME's Indonesian Economy*, (Australia: Australia National University), hlm. 10.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa impor produk-produk industri mesin listrik mengalami peningkatan, dari 7,8 % di tahun 1971-1975 menjadi 10,2 % di tahun 1976-1980. Hal ini berarti kebutuhan akan mesin-mesin listrik semakin meningkat. Peningkatan juga terjadi pada impor mesin-mesin presisi, tahun 1971-1975 impor mesin presisi sebesar 1,8%, meningkat 0,1% pada periode 1976-1980 menjadi 1,9%. Meningkatnya kebutuhan mesin-mesin listrik dan mesin presisi juga dapat diketahui dari jumlah total impor Indonesia untuk golongan barang tersebut. Komoditi mesin listrik dan mesin presisi tergolong dalam barang-barang modal (*capital goods*), total impor barang-barang modal Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7.**  
**Impor Menurut Kelompok Barang (juta US dollar)**

Klasifikasi Barang	1972/ 1973	1973/ 1974	1974/ 1975
Barang Konsumsi	528,8	1003	291
Bahan Baku	656,1	1167	2097
Barang Modal	525,9	776	1095
Total	1710,8	2946	4113

Sumber: Bank of Indonesia; Report of Financial Year 1974/1975, hlm. 46.

Peningkatan nilai impor mesin listrik dan presisi sekaligus menandakan adanya hasil yang positif dari usaha promosi peserta-peserta asing terhadap produk kedua jenis mesin tersebut untuk konsumen Indonesia. Impor barang-barang mesin listrik dan presisi tersebut sejalan dengan program

pemerintah dalam Pelita I (1969/1970- 1973/1974) mengenai kebijaksanaan impor yang diarahkan kepada usaha memperlancar penyediaan barang yang dibutuhkan untuk usaha produksi yaitu barang modal dan bahan baku / penolong, dengan menjamin arus impor yang bersangkutan. Selain itu pemerintah juga memprioritaskan impor barang-barang yang mendukung perkembangan industri dalam negeri.<sup>38</sup> Sementara itu impor alat-alat transportasi justru mengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar 1,5 %. Impor alat-alat transportasi tahun 1971-1975 adalah sebesar 15,3% dan 13,8% pada tahun 1976-1980. Nilai impor tersebut berbanding lurus dengan nilai impor barang-barang konsumsi yang semakin menurun.<sup>39</sup>

### 3. Dampak terhadap Investasi

Jakarta Fair juga memberikan dampak terhadap investasi atau penanaman modal, baik itu berupa penanaman modal asing maupun modal dalam negeri. Penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri bisa masuk ke berbagai sektor. Salah satu sektor pada periode tersebut yang membutuhkan modal dalam negeri dan modal asing adalah sektor perindustrian.

Untuk mengembangkan sektor industri pemerintah berupaya mendorong pihak swasta agar tertarik untuk berinvestasi di bidang tersebut. Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai hal tersebut adalah mengadakan pameran dan promosi di Jakarta Fair. Beberapa segi mengenai perkembangan sektor industri di Indonesia beserta kemungkinan-kemungkinan investasi di sektor tersebut dapat dilihat oleh pengunjung Jakarta Fair di Stand Departemen Perindustrian di arena Jakarta Fair. Keberhasilan upaya mempromosikan bidang industri kepada investor dapat diketahui dari jumlah proyek dan nilai investasi yang diperoleh Indonesia pada saat itu.

Secara sektoral, penanaman modal dalam negeri paling banyak ada pada sektor industri manufaktur dibanding sektor yang lain. Industri yang paling diminati yaitu tekstil dan kulit, dengan total investasi selama tahun 1968-1977 sebesar 5,3 miliar rupiah dan jumlah proyek paling besar diantara industri lainnya yaitu sebesar 478 jumlah proyek.<sup>40</sup>

Sedangkan pada investasi asing, secara keseluruhan sejak tahun 1967-1978 nilai investasi asing paling besar ada pada sektor industri yaitu sebesar 2.179,8 juta dollar, dengan jumlah proyek paling banyak

<sup>38</sup> Bank of Indonesia: Report of Financial Year 1974/1975, hlm. 45

<sup>39</sup> Mobil, dan alat-alat transportasi merupakan salah satu contoh barang konsumsi. Untuk mengetahui nilai impor barang-barang konsumsi lihat Tabel 15.

<sup>40</sup> Laidin Girsang, *Indonesia Sejak Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Laita), 1979, hlm. 1122-1123

diantara sektor-sektor lain yaitu sebesar 387 proyek.<sup>41</sup> Dari sektor industri yang paling banyak mendapat modal asing adalah industri kimia dan karet dengan nilai investasi sebesar 337,6 juta US dollar, dan jumlah proyek sebanyak 115 proyek.

Peningkatan investasi di bidang industri Indonesia khususnya industri manufaktur (pengolahan) yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) menandakan bahwa sektor industri di Indonesia sangat menarik bagi para investor untuk dikembangkan. Hal ini sejalan dengan maksud pemerintah yang ingin merubah struktur industri. Sebelumnya produksi nasional didominasi oleh sektor pertanian yang sifatnya ekstraktif tanpa ada proses lebih lanjut dari hasil-hasil pertanian tersebut. Hal tersebut dapat mengakibatkan ketergantungan impor barang-barang yang mendukung industri semacam itu. Dari sinilah timbul kebijakan baru untuk mengubah pola industri menjadi industri yang menghendaki proses yang menyeluruh atas pembuatan barang-barang akhir (*integrated industries*).<sup>42</sup>

#### **Manfaat Bagi Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat**

Jakarta Fair tidak hanya sebuah acara pameran yang sifatnya komersil, tetapi juga mengandung konsep sebuah acara pameran sekaligus pesta rakyat, sehingga kegiatan ini memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh pemerintah, para peserta pameran (pelaku industri, pedagang, dsb), dan masyarakat.

Manfaat penyelenggaraan Jakarta Fair bagi pemerintah daerah adalah menambah penerimaan daerah, salah satunya berasal dari pajak tontonan.<sup>43</sup> Djakarta Fair sejak pertama diselenggarakan, menerapkan tarif masuk (karcis) bagi masyarakat yang berminat menonton Jakarta Fair. Selain itu Jakarta Fair juga menjadi alternatif wisata hiburan yang disediakan pemerintah untuk masyarakat.

Sedangkan bagi peserta pameran, yaitu dari kalangan korporasi, perusahaan, pedagang, maupun instansi pemerintah, dengan diselenggarakannya Jakarta Fair ini telah menyediakan wadah promosi yang baik untuk produk-produk dari masing-masing peserta. Para pengusaha juga dapat berkomunikasi langsung dengan peminat produk yang ditawarkan. Sedangkan untuk peserta non-komersil seperti seperti BKKBN, BATAN, dan Departemen-Departemen milik pemerintah, dapat memberikan berbagai informasi mengenai perkembangan departemen terkait. Intinya semua peserta mendapat manfaat yang sama yaitu dapat melakukan promosi langsung kepada publik mengenai produk yang dimiliki.

Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat baik masyarakat kalangan atas maupun bawah, yaitu kegiatan ini memberikan hiburan yang murah. Para

pengunjung Jakarta Fair bebas menyaksikan beraneka macam hiburan, mulai dari hiburan yang murah seperti panggung-panggung musik dangdut, maupun band-band, dan penyanyi-penyanyi ibukota, sampai hiburan yang tergolong mahal seperti sirkus. Ada juga acara-acara ketangkasan seperti berbagai ajang perlombaan, dan kontes pemilihan Miss Jakarta Fair yang menarik untuk ditonton.

Selain itu kegiatan ini juga membawa dampak peningkatan ekonomi penduduk sekitar. Jakarta Fair membantu menyediakan lapangan kerja temporal, seperti tukang parkir, petugas stand, SPG (*Sales Promotion Girl*) dari stand-stand, petugas keamanan dan sebagainya. Salah satu contoh misalnya pada penyelenggaraan Jakarta Fair yang kedua, melibatkan  $\pm 13.600$  pekerja harian  $\pm 12.000$  orang sebagai petugas stand petugas parkir<sup>44</sup>.

#### **C. Penutup**

Hasil penelitian ini membuka cakrawala berfikir tentang bagaimana sebuah negara berupaya menghidupi dirinya dan memajukan ekonominya. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam, artinya Indonesia punya modal yang besar untuk lebih produktif menciptakan sumber-sumber pendapatan. Produksi-produksi dalam negeri harus didorong agar terus berkembang, dalam hal ini pemerintah adalah fasilitator terutama untuk masalah pemasaran. Dengan diselenggarakannya Djakarta Fair pemerintah telah menjalankan tugasnya sebagai fasilitator. Selain itu penyelenggaraan Djakarta Fair menandakan ada semangat untuk meningkatkan produktifitas, dan rasa bangga terhadap produk-produk dalam negeri. Penyelenggaraan Djakarta Fair juga menandakan bahwa Indonesia memiliki kepercayaan diri dan optimisme bahwa produk-produk nasional memiliki potensi yang baik dalam hal daya saing sehingga layak untuk dipasarkan ke luar negeri.

Dari penelitian ini hal yang dapat dipahami sebagai pembelajaran dari sebuah peristiwa masa lampau adalah bahwa ketika kondisi negara stabil secara politik dan ekonomi maka kehidupan masyarakat turut membaik, rencana-rencana pembangunan di berbagai bidang pun akan semakin mudah dilaksanakan, dan jalinan hubungan internasional dalam berbagai bidang akan semakin baik. Misalnya ketika Indonesia ingin menjalin kerjasama di bidang perdagangan dengan negara asing, jika kondisi di dalam negeri aman, ekonomi dan politik stabil maka tingkat kepercayaan negara asing terhadap Indonesia akan tinggi.

Selain masalah stabilitas nasional, dari dalam negeri sendiri harus ada upaya-upaya nyata untuk memajukan bangsa. Di bidang ekonomi misalnya, ketika Indonesia ingin memajukan produk-produk lokalnya, salah satu usaha nyata yang dilaksanakan pada awal Orde Baru tersebut adalah mengadakan pameran Jakarta Fair. Jakarta Fair adalah wadah promosi produk-produk

<sup>41</sup> P.C. Suroso, *Op. Cit.*, hlm. 332

<sup>42</sup> Laidin Girsang, *Op. Cit.*, hlm. 1121.

<sup>43</sup> Ramadhan K.H., *Op. Cit.*, hlm.198

<sup>44</sup> Koran Kompas, 16 Juni 1969, 'Djakarta Fair 1969 Dibuka dalam Suasana Meriah', hlm. 3

nasional. Promosi sendiri adalah bagian penting dari aktivitas perdagangan. Tanpa melakukan promosi produk-produk Indonesia tidak akan dikenal secara luas baik dari calon konsumen dalam negeri maupun luar negeri. Di bidang sosial misalnya, ketika kebutuhan sarana hiburan di Jakarta untuk masyarakat umum perlu ditambah, maka upaya nyata adalah menyelenggarakan Jakarta Fair. Jakarta Fair tidak hanya semata-mata kegiatan pameran tetapi juga sebagai pekan raya, yang memiliki konsep pesta rakyat sehingga masyarakat umum baik dari golongan atas maupun bawah dapat menikmati hiburan di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

- Peraturan Presiden nomor 6 tahun 1961 tanggal 20 april 1961, tentang penyelenggaraan pekan raya dan pameran Indonesia.
- Laporan Keuangan Bank Indonesia Tahun 1968-1975.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.D. IV-a.11/ 1130/ 73 tentang pola pembangunan arena Djakarta Fair di lapangan Monumen Nasional periode ke-II tahun 1974-1978.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. D.V-2252/a/75 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepesertaan dalam Pekan Raya Jakarta.

### Koran dan Majalah

- Kompas 11 Juli 1969. 'Organisasi-Organisasi Swasta Belum Memanfaatkan DF',
- Kompas, 16 Juni 1969, 'Djakarta Fair 1969 Dibuka dalam Suasana Meriah.'
- Majalah Ekspres, 2 agustus 197, '4x4x4 Djakarta Fair 71'Dibuka',
- Majalah Sketmasa, 3 Juli 1969, 'Ekonomisasi Melalui Jakarta Fair'

### Buku

- Aminudin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.
- Booth, Anne dan Peter McCawley. 1982. *Ekonomi Orde sBaru*. Jakarta: LP3ES.

Badan Pengurus Pekan Raya Jakarta, *Pekan Raya Jakarta VIII 1975 ( 14 Juni-19 Juli)*, (Jakarta: PT. Prima Advera LTD, 1975).

Blackburn, Susan. 2011. *Jakarta Sejarah 400 Tahun*. Jakarta: Masup Jakarta.

Emmerson, Donald K. 2001. *Indonesia Beyond Soeharto; Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

*Ensiklopedi Jakarta Vol , 1*

Laidin Girsang. 1979. *Indonesia Sejak Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Laita.

P.C Suroso. 1994. *Perekonomian Indonesia; Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ramadhan K.H, 1995. *Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Tom Gunadi. 1981. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 45*, Bandung: Angkasa.

Van Zanden, Jan Luiten dan Daan Marks. 2012. *Ekonomi Indonesia 1800-2010; Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan* . Jakarta: Kompas.

Zulkarnain Djamin. 1993. *Perekonomian Indonesia Edisi Dua*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

### Internet

Hayashi, Mitsuhiro. *Development of SME's Indonesian Economy*. Australia: Australia National University. Diakses dari <https://digitalcollections.anu.edu.au/bitstream/1885/40351/3/wp-econ-2003-01.pdf>, tanggal 29 Januari 2014.

Paramita Widyaningrum. *Peranan Ali Sadikin Dalam Pembangunan Kota Jakarta Tahun 1966-1977*. FKIP UNS. Solo: UNS Press. Diakses dari <http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sejarah/article/download/1601/1171>. Tanggal 30 September 2013